

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- A. Qirom Syamsuddin Meliala. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Liberty.
- Ahmad Miru, S. P. (2008). *Hukum Perikatan*. Rajwali Pers.
- Andi Hartono. (2014). *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. Laksbang Justitia Group.
- Arie S.Hutagalung. (n.d.). *Perspektif Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan*.
- Baskoro, W. N. (2007). *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah* (hal. 17).
- Benni, B., Kurniawarman, K., & Rahman, A. (2019). Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Dalam Peralihan Tanah Karena Pewarisan Di Kota Bukittinggi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 65. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.175>
- Boedi Harsono. (2007). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet. Ke-11*. Djamban
- Budiartha, A. &. (2019). *Sistematika Filsafah Hukum Perspektif Persoalan - Persoalan Pokok*. Setara Pers.

Elfachri Budiman. (2005). Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)". *Jurnal Hukum USU*, 01, 74.

Florianus S. (2007). *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Visimedia.

Hadimulyo. (1997). "*Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.*" ELSAM.

Ilyas Ismail. (2011). Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH DALAM PROSES PERADILAN A CERTIFICATE OF LAND AS AN EVIDENCE OF LAND IN JUDICIAL SYSTEM Oleh: Ilyas Ismail *). *of the Act Number, 19(53)*, 23–34.

Kaelan. (2003). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II. (1995). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Balai Pustaka, Jakarta.

Liliana Tedjosaputro. (1994). *Etika Profesi Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bigraf Publishing.

Limbong, B. (2011). *Koflik Pertanahan*. Margaretha Pustaka.

M.A. Moegni Djojodirdjo. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita.

M Arba. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.

Mahkamah Agung RI. (1994). *PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN*

ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN (hal. 110).

Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.

Muljadi.K & Widjaja.G. (2008). *Hak-Hak atas Tanah*. Kencana.

Munir Faudi. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Pemerintah RI. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 Ayat (1)*.

Prawirohamidjojo, S. (1992). *Itikad Baik (Goede Trouw/Good Faith), Pidato dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XXXVIII Universitas Airlangga*.

Prof. Boedi Harsono. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Universitas Trisakti.

Prof. DR. A. P. Parlindungan, S. (n.d.). (1990). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. CV. Mandar Maju.

R. Wirjono Projodikoro. (1994). *Perbuatan Melanggar Hukum*.

Ronny Haniatjo Soemitro. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. PT. Ghalia Indonesia.

Ruchiyat E. (1989). *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*. CV Armico.

Rusmadi Murad. (1991). *No Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*.

Alumni.

Rusmadi Murad. (1999). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*". Alumni.

Salim HS. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.

Santoso, U. (2011). *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana.

Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana Prenada
Media Group.

Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas
Indonesia

Soerodjo Irawan. (2014). *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan atas Tanah
(HPL)*. Laksbang Mediatama.

Sri Soedewi Masyohen Sofwan. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia
dalam Teori dan Praktek*. Liberty.

Sugiyono. (2015). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*.
Alfabeta.

Sumarto, SH, M. E. (2012). "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan
dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI."
*Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI
tanggal 19 September, 2.*

Susanto, H. R. O. S. D. A. F. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologis Hukum*. PT
Alumni.

- Syahrul Machmud. (2008). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Mandar Maju.
- Syahrul Mahmud. (2008). *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang di duga melakukan Medikal Malpraktek, Cetakan kesatu*. CV. Mandar Maju.
- Urip Santoso. (2010). *PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH*. Kencana Prenada Media Group.
- Urip Santoso. (2017). *Prolehan Hak atas Tanah*. Kencana.
- Urip Santoso. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Kencana.
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. PT. Citra Aditya Bhakti.
- Wirjono Prodjodikoro, R. (1995). *Azas-azas hukum perdata*. Bandung : Sumur Bandung, 1995.
- Wiryani F. (2018). *HUKUM AGRARIA Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan*. Setara Press.
- Sumarto, SH, M. E. (2012). "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI." *Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2.*

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang peraturan
pelaksanaan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997

Het Herziene Inlands Reglement (HIR)

C. Sumber Jurnal :

Baskoro, W. N. (n.d.). (2007). *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah*.

Benni, B., Kurniawarman, K., & Rahman, A. (2019). Pembuatan Akta
Pembagian Hak Bersama Dalam Peralihan Tanah Karena Pewarisan Di
Kota Bukittinggi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 65.

<https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.175>

- Elfachri Budiman. (2005). Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)". *Jurnal Hukum USU*, 01, 74.
- Hutagalung, A. S. (2002). Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Yang berlaku. *Hukum Bisnis*, 52.
- Ilyas Ismail. (2011). Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH DALAM PROSES PERADILAN. *of the Act Number, 19(53)*.
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>
- Hutagalung, A. S. (2002). Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Yang berlaku. *Hukum Bisnis*, 52.
- Baskoro, W. N. (n.d.). (2007). *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah*. (BLOG)
- Elfachri Budiman. (2005). Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)". *Jurnal Hukum USU*, 01, 74.
- Sumarto, SH, M. E. (2012). "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI." *Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2*.
- Nasional, B. P. (1998). *Menteri Negara Agraria/*. April, 2–5.
- Mahkamah Agus RI. (1994). *PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN*.